

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penggolongan pegawai negeri di Indonesia maka TNI termasuk dalam penggolongan salah satu jenis pegawai negeri. Pegawai negeri termasuk anggota TNI memiliki peranan yang sangat penting dalam berjalannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya selain menjadi abdi masyarakat, maka anggota TNI sebagai pegawai negeri juga merupakan abdi negara.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya maka anggota TNI sebagai pegawai negeri juga memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan yang secara langsung akan berpengaruh kepada hasil pelaksanaan tugas yang diembannya sebagai aparatur negara. Oleh karena itu, masalah kepegawaian di negara – negara sedang berkembang harus mendapat perhatian untuk dipecahkan oleh kondisi-kondisi kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan dapat tercapai.

Beberapa hal yang sangat penting yang harus dilakukan untuk menyempurnakan kondisi-kondisi kepegawaian di negara Indonesia.

Pertama, meningkatkan peranan pelaksanaan tugas rutin pemerintah ke arah kemampuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan. Bahkan diharapkan pegawai Negeri dapat menjadi unsur pembaharu.

Kedua, usaha untuk mengubah sikap legalitas ke arah pendekatan yang lebih bersikap pemecahan masalah. Kecuali itu karena warisan mana etatisme dimana pejabat merupakan raja perlu diubah menjadi abdi masyarakat ini. Ketiga, mengusahakan suatu keadaan kepegawaian yang lebih stabil dan berkelanjutan. Keempat, usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai negeri. Hal ini berkaitan erat dengan masalah motivasi untuk lebih mengubah orientasi ke prestasi kerja. Ini berhubungan dengan soal peningkatan kesejahteraan secara bertahap.

Dengan demikian maka dalam pembahasan ini meletakkan anggota Tni sebagai pegawai pada fungsi yang semestinya adalah menjadi amat penting dalam kegiatannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pada dasarnya sering kali pegawai negeri merupakan suatu sosok yang hanya turut perintah atasannya, baik itu dalam hal pelaksanaan tugas-tugasnya maupun bidang – bidang yang dikerjakannya. Hal ini berakibat tidak efektifnya pekerjaan yang dilakukan pegawai negeri tersebut sehingga dengan demikian secara langsung berakibat tugas-tugas yang dijalankannya tidak menghasilkan hasil yang maksimal.

Keadaan ini harus dapat dikendalikan dengan adanya formalisasi dan pembagian kerja yang benar-benar mewujudkan potensi pegawai tersebut sehingga terciptanya suatu penilaian tentang kepuasan kerja.

Bertitik tolak dari keseluruhan uraian di atas maka penulis memilih judul untuk penulisan skripsi ini, yakni :

“ PENGARUH FORMALISASI DAN BESARNYA UNIT KERJA TERHADAP TINGKAT KEPUASAN KERJA DI LINGKUNGAN KODIM